

**PENGARUH PENDIDIKAN, PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PROGRAM RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

*Ratnajati Asnawi<sup>1</sup>, Paulus Kindangen<sup>2</sup>, Daisy S.M. Engka<sup>3</sup>*  
*atiasnawi@gmail.com*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Universitas Sam Ratulangi*

**ABSTRAK**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu isu penting penghambat pembangunan daerah. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak yang menjadi wilayah prioritas gerakan ODSK (operasi daerah selesaikan kemiskinan) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh pendidikan kepala keluarga, PKH dan Program RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan menggunakan sampel rumah tangga di 8 (delapan) kecamatan dengan total responden sebanyak 134 rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan variabel bebas adalah tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah bantuan dana PKH dan RTLH yang diterima rumah tangga, dan variabel terikatnya adalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif antara pendidikan kepala keluarga, bantuan sosial PKH dan RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga lebih besar dibandingkan dengan bantuan PKH dan RTLH dalam upaya pengentasan kemiskinan. Variasi perubahan penurunan kemiskinan 51,22% disebabkan oleh variasi perubahan tingkat pendidikan kepala keluarga, jumlah bantuan sosial (PKH dan RTLH) yang diterima rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.

**Kata kunci :** Bantuan PKH, Bantuan RTLH, Pendidikan, Pengentasan Kemiskinan

**ABSTRACT**

*The problem of poverty is one of the important issues in regional development. Kabupaten Minahasa Tenggara is a district with the highest percentage of poor population being the priority area of the ODSK North Sulawesi Province.*

*This study aims to analyze the magnitude of the influence of family head education, PKH and RTLH programs on poverty alleviation in Kabupaten Minahasa Tenggara. By using a sample of households in 8 districts with total of 134 households.*

*The analytical method used is multiple regression with the independent variable is the level of education of the head of the family, PKH and RTLH programs. The dependent variable is poverty alleviation in Kabupaten Minahas Tenggara.*

*The results showed that partially education and PKH program significantly influenced and had a positive relationship on poverty alleviation in Kabupaten Minahasa Tenggara. And simultaneously all variables significantly influence poverty alleviation. Variations in changes in poverty alleviations 51,22% are caused by variations in changes in the level of education of family heads, and the households social assistance (PKH and RTLH) in Kabupaten Minahasa Tenggara.*

**Keywords :** PKH program, RTLH program, Education, Poverty Alleviation.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sumberdaya manusia menjadi isu penting dalam pembangunan, karena disatu sisi menjadi aset atau modal pembangunan disisi lainnya dapat menjadi beban pembangunan. Sumber daya manusia yang menjadi beban pembangunan adalah SDM yang tidak berkualitas dan hidup dibawah garis kemiskinan. Karena itulah SDGs (*sustainable development goals*) dengan 17 tujuan sebagai kelanjutan dari MDGs (*millennium development goals*) tetap memprioritaskan masalah kemiskinan sebagai tujuan pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu agenda MDGs yang belum terselesaikan sampai tahun 2015.

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu dari 3 (tiga) kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Utara sehingga dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016 – 2021 masalah kemiskinan masih merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Prioritas ini menopang program Provinsi Sulawesi Utara yaitu Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dengan target penurunan kemiskinan sampai 40 % di Tahun 2021 (tahun 2015 tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Utara 8,56% artinya tahun 2021 menjadi 5,2%).

Hal ini menarik untuk diangkat karena sebagai wilayah target yang diintervensi oleh pemerintah provinsi bersama dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termuat dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD) Provinsi Sulawesi Utara. Diantaranya daerah perlu mengadakan evaluasi terhadap beberapa program manfaat seperti PKH, RTLH, RS-RUTILAHU, KUBE, KIP, KIS, RASTRA, PBI, SARLING, Kartu Tidak Mampu, subsidi bunga untuk UMKM yang diterima oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010 tentang pembentukan TKPK, maka Kabupaten Minahasa Tenggara telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara ;
2. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara ;
3. Bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Program prioritas penanggulangan kemiskinan juga tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2019-2023.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2011- 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara berada di atas nilai provinsi dan nasional. Walaupun kecenderungan persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung turun perlahan (2011-2017) turun 1,27% (dari 15,35% tahun 2011 menjadi 14,08% tahun 2017) atau secara rata-rata turun 0,18% tiap tahunnya. Angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2016 mencapai 16,10%.

Fenomena turunnya angka kemiskinan hanya 1,27% dalam 6 (enam) tahun dan berbagai program prioritas untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan termasuk alokasi anggaran



yang disediakan pemerintah daerah membuat penulis mengangkat masalah kemiskinan sebagai topik penelitian. Pemerintah pusat menetapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sampai ke level kabupaten dan kota. Beberapa program nasional sampai daerah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Besarnya dana bantuan penerima rehabilitasi sosial-rumah tinggal layak huni adalah sebesar Rp. 15.000.000 sesuai dengan keputusan kementerian sosial direktorat penanganan fakir miskin nomor 653/SK/4.4.3/10/2019. Tahun 2019 jumlah penerima RTLH di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 130 rumah tangga.

PKH diberikan pada rumah tangga sangat miskin dan ditetapkan dalam keputusan kementerian sosial para penerima program manfaat bersyarat ini. Tahun 2019 jumlah penerima PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 5.119 keluarga dengan total anggaran sebesar 6,5 miliar rupiah. Tujuan program ini yaitu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan pada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan cara peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price effect) dan memberi kepastian kepada si anak akan masa depannya (insurance effect). Price effect ditujukan pada harapan adanya peningkatan kualitas SDM karena ada peningkatan kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada peningkatan produktivitas SDM. Manfaat lain yaitu mengurangi pekerja anak dan mempercepat pencapaian MDGs. Syarat yang diberikan kepada masyarakat penerima PKH ini adalah anak usia 0-6 tahun, anak dibawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan ibu hamil/nifas.

Penelitian ini mengangkat isu kemiskinan mikro rumah tangga melalui proksi rasio pendapatan rumah tangga hasil survey dan garis kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada peneliti mengangkat 4(empat) permasalahan utama dalam penegntasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kepala keluarga terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Bagaimanakah pengaruh Program PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara?
3. Bagaimanakah pengaruh RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara?
4. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kepala keluarga, Program PKH dan RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara?

### **Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Menganalisis pengaruh Program PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Menganalisis pengaruh Program RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan kepala keluarga, Program PKH dan RTLH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan pengentasan kemiskinan di kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian tentang kemiskinan dan pengentasan kemiskinan di masa datang.

### Tinjauan Pustaka

#### Landasan Teori

- **Pengertian dan Penyebab Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam lima kelompok yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara (Sumodiningrat, 1999:4). Kemiskinan Absolut, terjadi jika pendapatan penduduk tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Kemiskinan Relatif, terjadi jika pendapatan penduduk di atas garis kemiskinan, namun relatif rendah bila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi *kemiskinan kultural*, *kemiskinan sumber daya ekonomi* dan *kemiskinan struktural*. Menurut Muhadjir (2005) *kemiskinan kultural* merupakan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. *Kemiskinan sumber daya ekonomi* menunjukkan bahwa akar kemiskinan itu pada ketidakpunyaan sumber daya ekonomi, seperti tanah dan modal, pendidikan dan ketrampilan, karena pertambahan penduduk yang sangat pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sedangkan *kemiskinan struktural* merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.

Definisi kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Badan Pusat Statistik yaitu sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standard kebutuhan minimum baik untuk makanan maupun non makanan. Dengan definisi ini, BPS telah menentukan suatu garis kemiskinan. Bagi individu yang pengeluarannya untuk makanan dan non makanan berada pada level dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS, maka individu tersebut berada pada kelompok individu yang miskin.

### Pengukuran Kemiskinan

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan *basic needs*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan *basic needs*, ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan



adalah persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Ukuran kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran per kapitanya sebulan. Masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan miskin. Garis kemiskinan adalah suatu standard minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan maupun non makanan per kapita sebulan.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, indikator yang melihat kemiskinan adalah: (BPS Pusat, 2008):

1. **Head Count Index (HCI – P0)**, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Indikator HCI menggambarkan prevalansi kemiskinan dalam suatu masyarakat, dan secara implisit indikator HCI mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin.
2. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1)**, adalah merupakan ukuran kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dengan Indeks ini bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan.
3. **Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2)**, yang memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin dan mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi *poverty gap* yang lebih miskin dibandingkan kurang miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Penghitungan garis kemiskinan kabupaten/kota merupakan dasar dalam penghitungan persentase penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota yang dirumuskan oleh Foster-Greesthorbecke (BPS Pusat, 2008), yaitu :

$$\text{RUMUS : } P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{Z - Y_i}{Z} \right]^{\alpha}$$

dimana :

Z = Garis Kemiskinan

Y<sub>1</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

q = Banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

α = 0, 1, 2 (Jika α = 0, diperoleh Head Count Index (P0), jika α = 1 diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) dan jika α = 2 disebut Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Indeks – P2)).

Pengukuran kemiskinan menurut kementerian sosial pada prinsipnya berhubungan dengan kesejahteraan secara sosial, ekonomi maupun budaya disebut PMKS (Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial). PMKS merupakan seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang mengalami hambatan serta gangguan dalam melaksanakan fungsi sosial sehingga menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani, rohani dan sosial secara normal.

Menurut BKKBN terdapat lima tingkatan diantaranya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III Plus.

### **Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan**

#### **1) Kependudukan**

Menurut Arsyad (2004), masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung akan menimbulkan masalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu indikator lainnya dalam masalah kependudukan ini adalah dilihat dari rasio angka beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang berada dalam usia kerja (produktif). Semakin kecilnya angka beban ketergantungan pada gilirannya akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

#### **2) Pendidikan**

Menurut Todaro (2006), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan penting. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan suatu negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

#### **3) Tenaga Kerja**

Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan tidak bekerja. Banyaknya penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan pula banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya, banyaknya pengangguran menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan. (BPS Pusat, 2010).

#### **4) Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan kualitas hidupnya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa, karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar (BPS Pusat, 2010).

Semakin besar tingkat kesakitan penduduk maka tingkat kesejahteraannya akan berkurang dan tingkat kemiskinan akan bertambah karena bila penduduk menderita sakit akan menyebabkan produktivitasnya akan berkurang sehingga tidak mendapatkan penghasilan/pendapatan maka akan berakibat penduduk akan bertambah miskin.



### 5) *Perumahan*

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok penduduk yang cukup penting disamping kebutuhan akan pangan dan sandang. Keadaan tempat tinggal penduduk dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang perumahan, sedangkan lingkungan merupakan kawasan di sekitar perumahan yang ikut mempengaruhi pertumbuhan manusia (BPS Pusat, 2010).

Informasi yang menggambarkan tentang perumahan dan lingkungan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik meliputi :

- Persentase rumah tangga menurut jenis dinding, luas lantai, jenis atap dan jenis lantai terluas,
- Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan,
- Persentase rumah tangga menurut sumber air minum dan fasilitas air minum,
- Persentase rumah tangga menurut fasilitas tempat buang air besar dan jenis kloset.

Disisi lain tempat tinggal atau perumahan menunjukkan status sosial atau mencerminkan derajat seseorang. Semakin tinggi status sosial maupun kemampuan finansial seseorang, maka semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga (BPS, 2008).

Untuk mengukur kesejahteraan rakyat, dapat dilihat dari akses penduduk untuk menyediakan air bersih di dalam rumahnya yaitu penyediaan air minum ledeng dan kemasan juga air minum bersih. Semakin besar kemampuan penduduk untuk menyediakan air bersih di rumahnya maka menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk semakin lebih baik dan keadaan ini dapat menunjukkan kemiskinan akan berkurang.

### **Hubungan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Kartasasmita (1996) rendahnya taraf pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan, karena taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri menjadi terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Pada umumnya, permasalahan pendidikan dan kemiskinan di Negara berkembang hampir serupa. Umumnya Negara berkembang menghadapi dilema apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu di pacu atau pendidikan yang lebih baik. Persoalan ini merupakan sebuah lingkaran setan.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, diantaranya pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah, kursus ketrampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran dsb) dan targetnya adalah kepala keluarga.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan aset SDM yang memberikan peluang kesempatan kerja lebih besar dan lebih baik sehingga mendapatkan upah yang layak. Effendi (1995) menyatakan bahwa pendidikan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan pengentasan kemiskinan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kamalfuadi, 2009, Pendidikan dan Kemiskinan

<sup>2</sup> Effendi & Tadjudin, Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan, 1995.

### Hubungan Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Bantuan sosial pemerintah memiliki sifat untuk mengurangi beban rumah tangga, membangun standar hidup layak, dan membantu menciptakan pendapatan serta upaya pemberdayaan. Edo Pratama Putra dkk dalam penelitiannya menggunakan data panel telah membuktikan bahwa bantuan sosial khususnya di daerah tertinggal memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

Dalam perkembangannya, cakupan kepesertaan dari program bansos juga semakin meluas untuk hampir semua program. Perluasan cakupan kepesertaan diikuti dengan peningkatan alokasi anggaran yang cukup signifikan. Cakupan PKH meningkat dari 2,3 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di tahun 2013 menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018. Dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari penerima bansos, kajian ini mencoba mengevaluasi beberapa aspek teknis program antara lain mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, kecukupan bantuan, dan kendala penyaluran atau pemanfaatan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei kepada 800 KPM yang diperoleh dari Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (DT PPFM) yang dikelola Kementerian Sosial khususnya penerima PKH. Untuk keterwakilan bagian barat, tengah dan timur maka dipilih empat kabupaten/kota yaitu Kota Jambi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Minhasa, dan Kota Kupang sebagai wilayah sampel. Penelitian menggunakan kerangka logic model dengan memfokuskan pada implementasi program bansos. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan matriks efektivitas yang dibuat berdasarkan data hasil survei.

Hasil evaluasi bansos di level pelaksanaan, yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. **PKH** menunjukkan bahwa a) Pemenuhan kewajiban khususnya terkait kesehatan dan penegakan sanksi masih kurang optimal; b) Faktor *supply side* masih menjadi salah satu kendala utama dalam pemenuhan kewajiban; c) Persentase anak KPM yang tidak naik kelas cukup tinggi; d) Mayoritas dari responden lansia dan disabilitas tidak pernah melakukan pemeriksaan dalam tiga bulan terakhir; dan e) Peran pendamping masih belum optimal.
2. **PIP** menunjukkan bahwa a) masih terdapat sekitar 42% anak usia sekolah dari KPM PKH yang belum menerima PIP; b) Terdapat sekitar 44% Penerima PIP yang menerima kurang dari bantuan minimal; c) Sebagian besar responden menggunakan bantuan PIP terkait keperluan biaya pendidikan dan uang saku siswa; d) Mayoritas penerima PIP mencairkan bantuan di kantor cabang bank; dan e) Kendala utama pencairan adalah administrasi yang rumit.
3. **Bantuan Pangan** menunjukkan bahwa a) Sebagian besar responden lebih memilih menerima bansos Rastha dibandingkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan b) Biaya tambahan menjadi salah satu kendala utama.
4. **PBI JKN** menunjukkan bahwa a) Masih ada 12% responden penerima PKH yang belum menjadi PBI JKN; b) Terdapat 2% peserta JKN tidak memiliki KIS. Di sisi lain, 2,6% responden yang memiliki KIS tetapi tidak merasa menjadi peserta JKN; c) Masih ada responden yang menjadi PBI JKN membayar iuran JKN; d) Masih ada responden mengeluarkan biaya tambahan yang dibayarkan ke faskes; dan e) Kendala utama dari sisi *supply side* (antrian lama, kamar penuh, ketersediaan kamar, dan lokasi yang jauh).

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan program bansos yang dilakukan, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut:



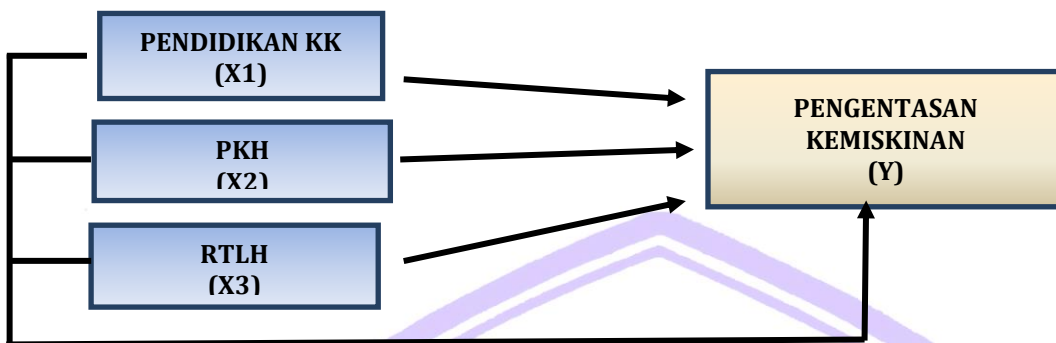
1. Untuk meningkatkan efektivitas program bansos dalam menurunkan angka kemiskinan dalam jangka pendek dan memutus mata rantai kemiskinan dalam jangka panjang, kualitas implementasi masing-masing program perlu diperbaiki. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan ketepatan sasaran, memperbaiki mekanisme penyaluran agar lebih efisien, tepat waktu, dan mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan sinergi antar program.
2. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, perbaikan basis data perlu dilakukan. Perbaikan tersebut perlu dilakukan secara kontinu dengan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan kelurahan/desa. Pemutakhiran data termasuk verifikasi dan validasi data perlu dilakukan secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, perubahan status kepesertaan (dari penerima menjadi bukan penerima) perlu diberitahukan kepada KPM sehingga tidak ada peserta yang masih memiliki kartu namun tidak mendapatkan bantuan.
3. Perlu untuk menelaah lebih lanjut catatan mengenai masih banyaknya anak usia sekolah penerima PKH yang belum menerima PIP dan penerima PKH yang belum menjadi PBI JKN. Koordinasi antar penyelenggara program perlu ditingkatkan.
4. Ketepatan waktu penyaluran bantuan perlu diperbaiki. Penyaluran secara non tunai menggunakan layanan perbankan dan teknologi perlu dioptimalkan agar memenuhi aspek cepat, tepat, efisien, dan akuntabel.
5. Untuk PKH, perlu memperkuat peran pendampingan dan penegakan sanksi untuk mendorong kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, perlu mempertimbangkan reward/punishment untuk kenaikan kelas bagi anggota KPM.
6. Untuk PIP, perlu dilakukan review atas kecukupan besaran bantuan PIP. Selain itu, karena adanya irisan manfaat bantuan pendidikan dalam PIP dan PKH, maka dapat dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan menggabungkan kedua program tersebut.
7. Bantuan untuk lansia dan disabilitas perlu ditingkatkan cakupannya namun sebaiknya dilakukan terpisah di luar PKH karena perlu perlakuan khusus dalam pemenuhan kewajibannya.
8. Perbaikan distribusi dan akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan perlu untuk dijadikan perhatian bersama (Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri, Kemenkeu, dan KemenPUPR) karena menjadi salah satu kendala utama dari PKH, PIP, dan JKN.
9. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan rentan perlu digencarkan. Selain itu, penambahan ATM dan branchless banking perlu digencarkan untuk mempermudah penyaluran bansos secara non tunai.

### **Hipotesa**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Diduga tingkat pendidikan KK secara parsial mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- b. Diduga program PKH secara parsial mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- c. Diduga program RTLH secara parsial mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- d. Diduga tingkat pendidikan KK, program PKH dan program RTLH secara bersama-sama mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Kerangka Pikir Penelitian



### METODE PENELITIAN

#### Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data kuantitatif yang terdiri atas data tingkat kemiskinan (P0, P1, P2), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per desa, data hasil survey rumahtangga, data bantuan RTLH dan PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan sumbernya data dibagi atas :

1. Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh instansi terkait bahkan sebagian telah dipublikasikan, data artikel dan jurnal. Sumber data sekunder berasal dari data BPS, Dinas Sosial, Dinas Perkim di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Data primer diperoleh dengan melakukan survey kepada rumahtangga penerima manfaat (kuisisioner terlampir). Dengan menggunakan sampel 8 (delapan) kecamatan dengan masing-masing 2 (dua) desa/kelurahan kecuali Kecamatan Belang terdiri atas 3 (tiga) desa dengan sampel 14-20 rumahtangga tiap desa. Total sampel adalah 134 rumahtangga.

#### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Kepustakaan, yaitu data diperoleh dengan membaca literatur dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Metode Observasi atau penelitian lapangan yaitu data diperoleh dengan melakukan survey ke rumahtangga penerima manfaat PKH/RTLH. Menggunakan kuisisioner yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian pertama adalah identitas responden terdiri atas 6 (enam) pertanyaan dan bagian kedua adalah daftar pertanyaan yang terdiri atas 15 pertanyaan. Bentuk pertanyaan tertutup (terdapat pilihan untuk diisi) seperti pendidikan kepala keluarga dan bukan kepala keluarga, pekerjaan dan lain-lain. Bentuk pertanyaan terbuka / esai (diberi kesempatan responden untuk mengisinya) seperti jumlah anggota rumahtangga, jumlah bantuan yang diterima, dan jumlah pendapatan keluarga.

#### Metode Pengambilan Sampel

Penarikan sampel yang mewakili populasi digunakan untuk mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil



sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Arikunto (2010:183)

Sampel berjumlah 134 rumahtangga yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 17 desa/kelurahan. Secara rinci : di Kecamatan Tombatu Utara sampelnya adalah desa Winorangian ( 7 responden) dan desa Tombatu Tiga ( 7 responden); di Kecamatan Ratatotok sampelnya adalah desa Ratatotok Muara( 7 responden) dan desa Basaan ( 7 responden); di Kecamatan Ratahan sampelnya adalah desa Lowu Utara ( 6 responden) dan desa Tosuraya Barat ( 7 responden); di Kecamatan Ratahan Timur sampelnya adalah desa Wioi ( 7 responden) dan desa Pangu Dua ( 7 responden); di Kecamatan Tombatu Timur sampelnya adalah desa Molompar Atas ( 7 responden) dan desa Molompar Dua Utara ( 8 responden); di Kecamatan Belang sampelnya adalah desa Molompar Timur ( 10 responden), desa Watulney ( 7 responden), dan Desa Mangkit (7 responden) ; di Kecamatan Tombatu sampelnya adalah desa Tombatu Satu ( 7 responden) dan desa Betelen Satu ( 18 responden); dan di Kecamatan Pasan sampelnya adalah desa Poniki ( 7 responden) dan desa Maulit ( 8 responden);

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

1. Pengentasan kemiskinan adalah rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2019 sebesar Rp. 325.896 diukur dalam Rupiah.
2. Pendidikan adalah tingkat pendidikan kepala keluarga di ukur dalam tahun. SD = 6 tahun; SMP= 9 tahun; SMA = 12 tahun ; dan PT = 14 tahun)
3. Program PKH adalah program pemerintah pusat dan daerah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara diukur dalam Rupiah.
4. Program RTLH adalah program pemerintah pusat dan daerah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara diukur dalam Rp/perkapita atau Rupiah/jumlah anggota rumahtangga.

### **Metode Analisis Regresi Berganda**

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan analisis regresi, dimana jika variabel bebasnya sama atau lebih dari 2 (dua) disebut regresi berganda. Manfaat utama regresi adalah untuk membuat perkiraan nilai suatu variabel jika nilai variabel yang lain yang berhubungan dengannya sudah ditentukan

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah analisis pengaruh variable dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel independent (variable penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,2003). Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisa regresi tersebut dinamakan OrdinaryLeast Square (OLS).

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Koefisien Korelasi (R) digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin kecil hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) suatu persamaan regresi, semakin besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Model dasar persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)  
 $X_1, X_2, \dots, X_n$  = Variabel independen  
 a = Konstanta (nilai Y apabila  $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$ )  
 b. = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka digunakan statistik uji t dan uji F.

- Uji t adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri dengan kriteria pengujian apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima atau apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.
- Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi/probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima dan jika tingkat signifikansi/probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Adapun formula penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = Pengentasan Kemiskinan  
 $X_1$  = Pendidikan KK  
 $X_2$  = Program PKH  
 $X_3$  = Program RTLH  
 $b_0$  = Konstanta,  
 $b_{1-2,3}$  = Koefisien regresi  
 $\epsilon$  = Standar Error

Penelitian ini akan mengambil sampel pemberian bantuan PKH dan RTLH di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018 dengan sampel 2 desa pada 5 kecamatan target.



### Uji Asumsi Klasik :

#### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Adanya Multikolinieritas dapat dengan metode VIF (*variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi yang normal yang memiliki batas angka *tolerance* lebih kecil dari 1, sedangkan batas angka untuk VIF adalah lebih kecil dari 10 .

#### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji lagrange multiplier (LM). Jika  $nR^2$  yang merupakan chi-squares ( $X^2$ ) hitung lebih besar dari nilai kritis chi-squares ( $X^2$ ) pada derajat kepercayaan tertentu ( $\alpha$ ), kita menolak hipotesis nol  $H_0$ . Hal ini berarti paling tidak ada satu  $p$  dalam persamaan secara statistik signifikan tidak sama dengan nol. Ini merupakan ada masalah Autokorelasi dalam model. Sebaliknya jika nilai chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita gagal menolak hipotesis nol. Artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua nilai  $p$  sama dengan nol.

Penentuan ada tidaknya autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas chi-squares ( $X^2$ ). Jika nilai probabilitas lebih besar dari  $\alpha$  yang dipilih maka kita gagal menolak  $H_0$  yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang dipilih maka kita menolak  $H_0$  yang berarti ada masalah Autokorelasi (Widarjono, 2013).

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan: Uji *White*:  $H_0$  = Heteroskedastisitas Jika nilai *chi-square* hitung lebih besar dari nilai  $X^2$  kritis dengan derajat kepercayaan tertentu ( $\alpha$ ) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika *chi-square* hitung lebih kecil dari nilai  $X^2$  kritis menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2013).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam analisis adalah data primer yang dikumpulkan dari 134 responden yang ditentukan dengan metode simple random sampling pada 8 (delapan) kecamatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini di uji secara statistik dengan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi. Secara deskripsi statistik menunjukkan bahwa rata-rata masing variabel menunjukkan bahwa rata-rata rasio pendapatan rumahtangga terhadap garis kemiskinan adalah Rp 135.520 dengan rata-rata jumlah bantuan PKH yang diterima sebesar 410.297 rupiah per bulan, dan rata-rata jumlah bantuan KUBE/kapita yang diterima 3.184.658 rupiah per rumah tangga.

Sebelum data dianalisis lebih lanjut dilakukan uji normalitas dan linearitas;

### 1. Uji Normalitas

Asumsi normalitas pada regresi linear OLS adalah pada residual, melalui eviews uji normalitas menggunakan metode Jarque Bera.

Hasil uji normalitas residual menunjukkan bahwa nilai Jarque Bera 13,67115 dengan probability 0,001075 dimana  $< 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi tidak normal. Ini disebabkan karena data yang digunakan adalah (*data cross section*) sampel 134 rumah tangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### 2. Uji Linearitas

Untuk menentukan model penelitian yang digunakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*), maka dilakukan uji linearitas dengan menggunakan Ramsey Reset Test.

Hasil menunjukkan bahwa p value yang ditunjukkan pada kolom probability F-Statistics sebesar 0,3531 dimana  $> 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa variabel bebas linear dengan variable terikat, atau dengan kata lain model yang digunakan bersifat BLUE sehingga bisa dianalisis lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji Breusch Godfrey Serial Correlation Test. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Probability Chi Square (2) yang merupakan nilai p value uji Breusch Godfrey Serial Correlation LM yaitu sebesar 0,1522 dimana  $> 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima atau artinya tidak ada masalah autokorelasi serial.

### 4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menilai adakah korelasi atau inter korelasi antar variabel bebas. Untuk itu digunakan *coefficient diagnostic* yaitu *Variance Inflation Factors* (VIF). Dengan eviews diperoleh bahwa baik X1, X2 dan X3 memiliki nilai centered VIF  $< 10$ . Ini berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian.

### 5. Uji Heteroskedastisitas

Dalam eviews untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat residual diagnostics melalui uji Breusch Pagan Godfrey. Hasil run eviews menunjukkan bahwa Probability Chi square (3) 0,1269  $> 0,05$ . Sehingga terima  $H_0$  atau model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

### Deskripsi Responden

Sampel 134 responden yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan rata-rata berusia 34-44 tahun (50 %) dengan jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4 orang dan pendidikan kepala keluarga 52% adalah lulus SD. Kepala keluarga bekerja dengan jenis lapangan pekerjaan terbanyak 77%



adalah sebagai petani dan petani penggarap. Bantuan pemerintah yang paling banyak diperoleh adalah Kartu Sehat.

### Estimasi Model Penelitian

Sampel jumlah rumah tangga pada 8 (delapan) kecamatan dan 17 desa di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah mereka yang menerima bantuan RTLH dan PKH serta yang hanya menerima salah satu bantuan sosial tersebut. Penerima manfaat PKH adalah mereka yang masuk dalam kelompok rumahtangga miskin sehingga ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dampaknya pada rumah tangga miskin.

- a. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan bantuan PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Terdapat pengaruh yang sangat signifikan pendidikan kepala keluarga terhadap pengentasan kemiskinan. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan bantuan RTLH terhadap pengentasan kemiskinan. Ini artinya bahwa program bantuan sosial pemerintah yaitu PKH dan pendidikan kepala keluarga memberikan pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- b. Hasil olahan data menunjukkan bahwa hubungan tingkat pendidikan kepala keluarga, bantuan PKH dan bantuan RTLH adalah positif ini berarti meningkatnya bantuan sosial pemerintah baik PKH dan RTLH serta peningkatan pendidikan kepala keluarga akan meningkatkan rasio pendapatan rumahtangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga program ini masih perlu dengan lebih memfokuskan rumahtangga target atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang tepat sasaran.
- c. Secara parsial besarnya pengaruh pendidikan kepala keluarga lebih besar pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan bantuan PKH yang diterima.
- d. Secara bersama-sama bantuan PKH dan RTLH serta pendidikan kepala keluarga signifikan mempengaruhi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- e. Korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 72,78%. Terdapat hubungan yang erat antara bantuan sosial pemerintah, tingkat pendidikan kepala keluarga dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- f. Sedangkan variasi perubahan naik turunnya rasio pendapatan rumahtangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain variasi kemiskinan secara signifikan dipengaruhi 51,22 % oleh variasi perubahan besarnya dana bantuan sosial (PKH dan KUBE) yang diterima rumahtangga serta tingkat pendidikan kepala keluarga. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Semakin tinggi pendidikan kepala keluarga akan membantu meningkatkan rasio pendapatan rumahtangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Pendidikan akan meningkatkan kualitas SDM dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji/pendapatan yang lebih tinggi. Rasio pendapatan terhadap garis kemiskinanpun akan meningkat. Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Todaro yang peduli pada pendidikan sebagai salah satu komponen pertumbuhan dan pembangunan

yang mengangkat kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin khususnya di negara sedang berkembang. Begitu juga mendukung pendapat Kartasasmita, Kamalfuadi dan Effendi yang menyatakan taraf pendidikan berhubungan dengan kemampuan pengembangan diri dalam pekerjaan.

Beberapa studi empiris juga menunjukkan pendidikan sebagai salah satu dimensi dalam kebijakan pengentasan kemiskinan (Sumargo, 2019), pendidikan rendah kepala keluarga merupakan salah satu penyebab rumah tangga miskin tetap miskin (Naschold 2009). Juga sejalan dengan penelitian Iswanto dkk (2008), yang menyatakan salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Secara tidak langsung disampaikan oleh Hasan (2005) melalui peran produktivitas SDM terhadap penurunan kemiskinan yang diantaranya didukung oleh peningkatan pendidikan tenaga kerja.

Beberapa penelitian juga menekankan pendidikan non formal kepala keluarga memberikan pengaruh positif dalam penurunan angka kemiskinan. Kolaborasi pemerintah dan non pemerintah dalam berbagai bidang termasuk pendidikan non formal merupakan salah satu strategi penting karena isu kemiskinan yang sangat kompleks atau bersifat multidimensional. Penelitian ini mengangkat tingkat pendidikan kepala keluarga adalah tingkat pendidikan formal atau lamanya sekolah (SD, SMP, SMA, Diploma dan perguruan tinggi).

Secara umum bantuan sosial pemerintah untuk fakir miskin mempengaruhi penurunan kemiskinan berdasarkan hasil studi empiris Edo dkk (2015). Ini sejalan dengan yang dihasilkan dalam penelitian ini walaupun hanya program PKH yang signifikan secara parsial sedangkan RTLH signifikan jika diuji bersama-sama dengan variabel lainnya. Begitu juga Prayitno (2018) saat meneliti tentang dampak dari program JPS untuk pendapatan rumahtangga miskin menyatakan bahwa dampaknya positif. Ini berarti peningkatan Social Safety Net meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin yang akan mengeluarkan mereka dari kemiskinan jika pendapatannya bisa mencapai diatas garis kemiskinan

Ternyata perluasan cakupan rumah tangga penerima manfaat beberapa bantuan sosial di Indonesia belum memberikan dampak signifikan pada penurunan kemiskinan di Indonesia, tidak sejalan dengan hasil penelitian ini.

Bantuan PKH yang merupakan bantuan pemerintah untuk rumah tangga sangat miskin dalam penelitian ini mendukung keberlanjutan program pemerintah, karena berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi empiris lainnya seperti yang dilakukan oleh La Ode (2018) di Kabupaten Wakatobi, hanya dalam jangka panjang La Ode membuktikan bahwa program ini tidak berpengaruh signifikan mengubah pola pikir RTSM.

Tapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Ghina F (2014) di Kabupaten Brebes yang membuktikan bantuan PKH tidak mengurangi kemiskinan karena rendahnya kualitas keluarga sangat miskin serta penyalahgunaan bantuan yang diberikan.

Bantuan RTLH yang diberikan untuk menopang kehidupan yang layak pada masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sejalan dengan hasil penelitian Suradi (2012) di Kota Banjarmasin yang secara lebih khusus menekankan pada kondisi sosial dan psikologis rumahtangga miskin. Bantuan sosial ini akan lebih optimal jika terdapat pendampingan sosial termasuk berfungsinya tim pengendalian saat implementasi program RTLH. Begitu juga dengan hasil



penelitian Praditia (2017) di Kota Payakumbuh ternyata program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin penerima manfaat.

Gerakan ODSK (operasi daerah selesaikan kemiskinan) di Provinsi Sulawesi Utara yang menetapkan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu prioritas daerah dari 15 kabupaten kota memiliki 3 (tiga) program prioritas yaitu jaminan pendidikan, jaminan kesehatan dan jaminan hidup layak. Inipun menjadi dasar bagi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terus memperhatikan masalah kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama pembangunan. Ditahun 2019 ini salah satu prioritas pembangunan daerah adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Secara parsial peningkatan pendidikan kepala keluarga memberi pengaruh yang sangat signifikan pada peningkatan rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Secara parsial peningkatan bantuan PKH pada rumah tangga memberi pengaruh yang signifikan pada peningkatan rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Secara parsial peningkatan bantuan RTLH pada rumah tangga tidak memberi pengaruh yang signifikan pada peningkatan rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Secara bersama-sama peningkatan pendidikan kepala keluarga, bantuan PKH dan RTLH memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain menurunkan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Variasi perubahan rasio pendapatan rumah tangga terhadap garis kemiskinan daerah atau dengan kata lain perubahan kemiskinan 51,22% disebabkan oleh variasi perubahan pendidikan kepala keluarga, jumlah bantuan sosial (PKH dan RTLH) yang diterima rumah tangga. 48,78% disebabkan oleh bantuan-bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah pada Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

### Saran

1. Program Bantuan Sosial yang bersifat membantu pengeluaran rumah tangga harus benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaatnya akan lebih besar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.
2. Perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam penyaluran bantuan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sampai ke lingkungan/jaga dengan mengadakan rapat koordinasi yang diikuti juga oleh para stakeholder di daerah tersebut.
3. Pentingnya bantuan sosial yang dapat menciptakan pendapatan bagi rumah tangga miskin sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

4. Perlu adanya validasi data secara rutin sehingga mengoptimalkan berbagai strategi daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Perlu adanya pendidikan/pelatihan non formal untuk para kepala keluarga sehingga meningkatkan produktivitas kerja selanjutnya akan bias meningkatkan pendapatan/ upah yang diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad Azhar, 2009, *Media Pembelajaran*, Raja Grafindo Persada Rineka Cipta.
- Edo P, Purnamadewi & Sahara, 2015, *The Effect of Social Aid to Economic Growth and Poverty on Underdevelopment Areas in Indonesia*.
- Ghozali Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghina Febrina, 2014, *Analisis Pelaksanaan PKH di Kabupaten Brebes*, Tesis, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL Universitas Diponegoro.
- Ginancar Kartasasmita, (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Center for Information And Development Studies (CIDES).
- Gujarati D.N & Porter D.C, (2009), *Basic Econometrics*, fifth edition, Mc. Graw Hill Int. edition, New York
- Hassan B Izhar, 2005, *Why Poverty Traps Emerge?*, Departement of Economics University of Copenhagen.
- Iswanto R.J, Yuliasih Eko, Aziz, 2008, *Strategi Keluar Dari Jebakan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal UPN Veteran Yogyakarta, Vol.1 No.5, Yogyakarta.
- La Ode Muhammad Elwan, 2018, *Implementasi PKH Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi*, Publicuho Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, ISSN 2460-058X,  
<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Muhadjir D, 2005, *Memanusiakn Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*, Benang Merah, Yogyakarta.
- Naschold F, 2009, *Poor Stays Poor : Household Assets Poverty Traps in Rural*, Organisation for Economic Co-Operation & Development(OECD), Publications Services, France.
- Praditia Diva D.S, 2017, *Evaluasi Dampak Program RS-RTLH Melalui Pola Bedah Kampung di Kota Payukumbuh Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sumargo B & Naomi S, 2019, *Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia*, JEPI, Vol. 19 No.2 Juli 2019, hlm 160-172.
- Sumodiningrat G, 1999, *Kemiskinan, Teori, Fakta dan Kebijakan*, IMPAC, ISBN 9789799569516.
- Suradi, 2012, *Pendekatan Kelompok Sebagai Modalitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Informasi, Volume 17. Nomor 02, hlm 65-74.
- Todaro, Michael P, (2006), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Widarjono Agus, 2013, *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.